



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI  
DENGAN  
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA, MENGHADIRKAN KEPALA BRGM, DIRUT  
PERUM PERHUTANI, DIRUT PT INHUTANI I DAN DIRUT PT INHUTANI V**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : I  
Rapat Ke- : 18 (Delapan Belas)  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 26 September 2022  
Waktu : Pukul 10.30 WIB s.d. 12.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat : Sudin, S.E.(Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDI P)  
Acara : Membahas penyesuaian RKA K/L TA 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran  
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. Anggota DPR RI:  
29 dari 54 orang Anggota dengan rincian:  
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
7 dari 11 orang Anggota  
1. Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI  
2. Riezky Aprilia, S.H., M.H.  
3. H. Sunarna, S.E., M.Hum. – Virtual  
4. Ir. Mindo Sianipar - Virtual  
5. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.  
6. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.  
7. Maria Lestari S.Pd.  
2. Fraksi Partai Golongan Karya  
4 dari 8 orang Anggota  
1. H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI  
2. Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.  
3. Alien Mus  
4. Ravindra Airlangga, M.S.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya  
5 dari 7 orang Anggota
  1. G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
  2. Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
  3. Ir. H.T.A. Khalid, M.M.
  4. Dr. Ir. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
  5. Ir. Dwita Ria Gunadi - Virtual
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat  
2 dari 6 orang Anggota
  1. Ir. Abdullah Tuasikal. - Virtual
  2. Yessy Melania, S.E. - Virtual
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa  
1 dari 6 orang Anggota
  1. Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
6. Fraksi Partai Demokrat  
4 dari 5 orang Anggota
  1. Dr. Suhardil Duka, M.M.
  2. Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si. - Virtual
  3. Muhammad Dhevy Bijak Pawindu
  4. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  
3 dari 5 orang Anggota
  1. drh. H. Slamet
  2. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
  3. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional  
3 dari 4 orang Anggota
  1. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.
  2. Haerudin, S.Ag, M.H.
  3. Ir. Alimin Abdullah
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  
0 dari 2 orang Anggota

## B. PEMERINTAH

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.);
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D.);
3. Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Direktur

- Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem) Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.);
4. Inspektur Jenderal (Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.);
  5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.);
  6. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum.);
  7. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc.);
  8. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ir. Laksmi Dhewanthi, M.A.);
  9. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M.);
  10. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc.);
  11. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ir. Ary Sudijanto, M.Sc.);
  12. Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.);
  13. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove);
  14. Kuasa Direktur Utama/Direktur Operasi Perum Perhutani (Natalas Anis Harjanto);
  15. Kuasa Direktur Utama/ Plt. Direktur Keuangan, Umum/SDM dan MR PT Inhutani I (Bakhrizal Bakrie); dan
  16. Direktur Utama PT Inhutani V (Dicky Yuana Rady).

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya,

Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove beserta jajaran,

Yang terhormat Direktur Utama Perum Perhutani yang dalam ini dalam hal ini ada surat kuasa diwakili Direktur Operasi Perum Perhutani karena Dirutnya tidak bisa hadir,

Yang terhormat Direktur Utama PT Inhutani I,

Yang terhormat Direktur Utama PT Inhutani V, beserta  
Hadirin yang kami hormati,

Mengawali rapat hari ini mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan jadwal acara Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Sidang I Tahun Sidang 2022 dan 2023 yang telah diputuskan dalam Rapat Pengganti Bamus tanggal 23 Juni 2022 dan Rapat Internal tanggal 18 Agustus, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas penyesuaian penyempurnaan RKA K/L Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 sesuai dengan hasil pembahasan Badan Anggaran. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan tentang Tata Tertib, Rapat Kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

### **(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)**

Rapat Kerja hari ini kami buka pada pukul 10.30 WIB dan akan diakhiri pada pukul 13.00 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) peraturan tentang tata tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

### **(RAPAT:SETUJU)**

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas Komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Pasal 59 ayat (2) peraturan tentang Tata Tertib atau membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi program Kementerian/Lembaga yang menjadi mitra Komisi, mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran Kementerian/Lembaga oleh Badan Anggaran dan Komisi menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran, hasil pembahasan Komisi sebagai bahan penetapan akhir APBN.

Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 170 ayat (2) sampai dengan ayat (4) bahwa Anggota Badan Anggaran dari komisi bersama Badan Anggaran membahas alokasi anggaran Kementerian lembaga yang telah diputuskan oleh Komisi dan hasil pembahasannya sampaikan kembali ke Komisi yang bersangkutan secara tertulis. Selanjutnya komisi bersama mitra kerja membahas alokasi anggaran hasil pembahasannya sampaikan oleh Komisi kepada Badan Anggaran untuk mendapatkan penetapan.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Kerja hari ini adalah berdasarkan surat Badan Anggaran Nomor: AG/16721/AG.05.02/09/2022 tanggal 20 September 2022 mengenai Penyampaian Hasil Pembahasan Rencana Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023. Berdasarkan surat Badan Anggaran tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp6,912,8 triliun. Adapun sebagaimana disampaikan dalam kesempatan Rapat Kerja dan rapat-rapat sebelumnya yang membahas RKA K/L Tahun Anggaran 2023 Komisi IV telah menyampaikan saran dan masukan serta harapan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat memprioritaskan Rencana Kerja dan Anggarannya untuk program yang dapat memberikan pemulihan ekonomi sosial bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan kondisi perekonomian dunia termasuk kondisi perekonomian Indonesia yang sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat terutama masyarakat kurang mampu.

Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga diharapkan terus memegang komitmen untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan menjaga kelestarian hutan dan sumber daya hutan serta melaksanakan mitigasi dampak perubahan iklim dan antisipasi bencana akibat kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana dampak dari fenomena El Nino yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023.

Teman-teman anggota Komisi IV yang saya hormati,  
Pimpinan Pak Budi,

Rapat Kerja sudah kita lakukan, RDP sudah kita lakukan dan Pleno terakhir tidak ada perubahan atau penambahan anggaran. Jadi hari ini Menteri hanya menjelaskan apa yang telah dijelaskan waktu kesimpulan rapat yang lalu, Rapat Kerja yang lalu.

Demikian pengantar ini kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri LHK untuk menyampaikan penjelasan Rapat Kerja hari ini.

**MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):**

Terima kasih Pimpinan.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,  
Yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI,

Pertama saya menyampaikan rasa syukur pada Tuhan atas Rapat Kerja hari ini dan terima kasih atas undangan rapat kerja berkenaan dengan RKA K/L KLHK tahun 2023. Dan terima kasih atas arahan dan *correct* dari Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI kepada KLHK untuk peningkatan kinerja.

Saya mohon izin untuk melaporkan RKA K/L KLHK Tahun 2023 bahwa pada dasarnya laporan kami ini secara prinsip sesuai dengan Rapat-rapat Kerja dan RDP terdahulu dan telah kami sesuaikan dengan catatan, arahan dari yang terhormat Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI.

Izinkan kami melaporkan bahwa sama seperti yang kami laporkan mengenai tema juga berkenaan dengan kebijakan sasaran makro ekonomi, dan kebijakan fiskal itu sesuai dengan catatan-catatan kami terdahulu, juga berkenaan dengan kinerja utama untuk 2023. Demikian pula seperti tadi disampaikan oleh yang terhormat Ketua bahwa RAPBN RKA K/L KLHK 2023 dan juga kami laporkan dengan angka pendapatan Rp5,268 triliun dan Pagu anggaran Rp6,912 triliun seperti yang telah kami laporkan terdahulu dan telah mendapatkan catatan, arahan dari yang terhormat Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota.

Izinkan kami langsung ke halaman 14. Posisi mutakhir pemutahiran Pagu anggaran KLHK tahun 2023 yaitu untuk kami mohon mendapatkan persetujuan dari yang terhormat Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI yaitu dengan nilai Rp6.912.784.958.000,- dengan konfigurasi:

- Sekretariat Jenderal Rp453.076.374.000,-;
  - Inspektorat Jenderal Rp93.291.651.000,-;
  - Direktorat Jenderal PHL Hutan Lestari Rp257.816.947.000,-;
  - Direktorat Jenderal DAS dan Rehabilitasi Hutan Rp1.361.950.098.000,-;
  - Direktorat Jenderal KSDAE Rp1.680.183.784.000,-;
  - Direktorat Jenderal Planologi PKTL Rp643.629.568.000,-;
  - Badan Standarisasi dan Instrumen sebesar Rp227.062.921.000,-;
  - BP2SDM Rp296.838.819.000,-;
  - Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan PSKL Rp300.977.609.000,-;
  - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum PHLHK Rp340.236.792.000,-;
  - Direktorat Jenderal Iklim PPI sebesar Rp291.123.292.000,-;
  - Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah PSLB3 Rp203.960.941.000,-;
  - Direktorat Pencemaran dan Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Ditjen PPKL sebesar Rp380.804.524.000,-; dan
  - Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebesar Rp381.831.638.000,-.
- Dan total Rp6.912.784.958.000,-.

Izinkan selanjutnya kami melaporkan pada halaman berikut tentang rinciannya dan *cluster* penggunaan menurut program. Dan kami mohon izin melaporkan ke langsung ke halaman 21 yaitu indikasi anggaran berbasis masyarakat untuk tahun 2023 dalam rangka alokasi penambahan alokasi

berdampak positif pada anggaran berbasis masyarakat yaitu menjadi sebesar 40,17 atau Pagu non operasional KLHK sebesar Rp4,168 triliun dan mohon izin kami melaporkan rinciannya per Direktorat Jenderal masing-masing. Terlihat pada halaman 22 untuk Direktorat Jenderal PHL, PDASRH, KSDAE. Dan pada halaman 23 untuk penyuluhan pengembangan SDM, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, dan Pengelolaan Sampah dan Limbah, serta Pencemaran, dan BRGM, serta Pengendalian Perubahan Iklim, dan BSI. Pada halaman 25 mohon periksa, untuk pelaksanaan bimbingan teknis tahun 2023 sebanyak 700 kali pelaksanaan bimbingan teknis KLHK dengan 11 komponen yang dapat diperiksa, mohon izin pada halaman 25.

Pimpinan, dan Ibu Bapak Anggota yang kami hormati,

Terakhir berkenaan dengan DAK kami masih melaporkan seperti yang lalu yaitu:

- Untuk bidang Lingkungan Hidup Rp2,25 triliun dengan 4 menu:
  - pengelolaan sampah dan sarana;
  - pengelolaan prasarana pendukung penurunan beban pencemaran;
  - *early warning system* untuk pengendalian bencana; dan
  - untuk penanganan Taman keanekaragaman hayati.
- Dan untuk Kehutanan 2024 sebesar Rp1,75 triliun untuk DAK dengan 2 menu, yaitu:
  - pengembangan sarana prasarana; serta
  - rehabilitasi hutan dan lahan.

Sesuai dengan hasil Rapat Kerja, kami juga telah melaporkan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Bappenas bahwa ada kebutuhan sesuai dengan hasil Rapat Kerja untuk kita mempersiapkan dengan tepat usulan DAK untuk 2024 dan kami juga masih mengusulkan untuk dapat dipenuhi di 2023.

Demikian laporan kami Ibu dan Bapak Pimpinan, serta Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati. Kurang lebihnya mohon maaf.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih atas penjelasannya, karena yang dijelaskan pun sama seperti Rapat Kerja yang terakhir.

Selanjutnya kami persilakan kepada Anggota Komisi IV yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan kami persilakan.

Sebelum teman-teman Anggota menyampaikan, saya selaku Ketua mengucapkan, Selamat ulang tahun. Yang pertama kepada sebelah kiri saya Ibu Anggia, selamat ulang tahun. Dan dengan waktu tanggal yang sama juga yang sebelah kanan saya juga ulang tahun. Selamat ulang tahun, semoga sehat, panjang umur, tambah sukses. Terima kasih.

Selanjutnya, silakan Anggota ada yang mau bertanya.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Baik.

Terima kasih. Terima kasih Ketua. Terima kasih doa-doanya dari sahabat-sahabat tercinta semuanya, doa yang sama untuk semua sahabat Bapak Ibu semuanya.

Baik.

Saya persilakan Pak Suhardi Duka untuk mengawali tanggapan Raker kita kali ini. Silakan Pak.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat pagi,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dewan yang terhormat,  
Yang saya hormati Ibu Menteri, Pak Sekjen, dan seluruh pejabat Eselon I,

Pada prinsipnya Raker ini adalah final setelah penetapan Pagu anggaran oleh Banggar, kita juga sudah RDP, dengan demikian Fraksi kami hanya memberikan beberapa catatan penting.

Yang pertama bahwa data tahun 2021 volume sampah di Indonesia itu 68,5 juta ton dan 2022 ini mungkin naik sampai 70 juta ton. Ada 24% atau sekitar 16 juta ton sampah yang tercecer atau tidak dikelola, karena hanya 7% yang terdaur ulang dan 69% yang masuk di TPA. Volume 16 juta ton ini yang masih belum bisa dikelola sampai saat ini oleh Dirjen PSLB3 perlu memiliki langkah-langkah yang terukur untuk mengurangi sampah yang tidak tertangani ini. Dibanding dengan Malaysia dan Singapura, Indonesia masih terlalu tinggi 16% sampah kita yang belum terkelola dengan baik. Itu yang pertama.

Yang kedua, IKHL 2020-2021 kita capai 71,43%, kemudian target 2023 69,48%. Apakah KLHK melihat bahwa kerusakan lingkungan Indonesia kedepan semakin buruk dan tidak mampu dikendalikan sehingga justru Indeks Kualitas Lingkungan Hidup kita menjadi targetnya turun. Kita berharap bahwa target kita pasang optimislah kalau bisa 75% lah kira-kira seperti itu, jangan kita target turun.

Yang ketiga, saat ini harga batubara sangat melambung tinggi. Tentu produksi batubara Indonesia saat ini semakin jor-joran, dampaknya pasti terhadap lingkungan. Di lain sisi, PNBPN kita hanya mendapatkan Rp1,6 triliun dari penggunaan kawasan hutan. Kita berharap bahwa mitigasi kerusakan lingkungan kita lebih baik ke depan, dengan demikian izin-izin untuk korporasi saya kira bisa dipertimbangkan lah, jangan dibanding dengan manfaat yang kita dapatkan dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan kita perlu semakin



ditingkatkan supaya kewajiban mereka untuk melakukan rehabilitasi lingkungan setelah penambangan itu bisa dilaksanakan dengan baik.

Yang selanjutnya, mitigasi bencana akibat deforestasi dan kerusakan lingkungan sangat penting, kita lihat banjir dimana-mana. Saya kira anggaran Rp6,9 triliun memang dirasakan tidak cukup, tapi kalau dikelola dengan baik dan bijak, saya yakin masyarakat bisa merasakan hasilnya. Saya percaya KLHK bisa melakukan itu, program-program yang ada di Dapil saya berharap dapat dirasakan kehadiran kami di Dapil. Koordinasi dan saling menghargai menjadi kunci kemitraan antara KLHK dan Komisi IV.

Akhirnya saya sampaikan Fraksi Partai Demokrat dapat menyetujui anggaran KLHK sebesar Rp6,9 triliun dengan harapan bisa bermanfaat untuk Indonesia kedepan.

Terima kasih Pimpinan.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq.  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M):**

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih, Pak Suhardi Duka.

Pak Sutrisno, silakan.

**F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat pagi, dan  
Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Pimpinan, teman-teman Anggota Komisi IV,  
Pak Menteri, Pak Wamen, para pejabat Eselon I beserta jajaran,

Langsung pada persoalan Pak Ibu Menteri, Pak Sekjen bahwa rapat kita adalah tentang RKA untuk 2023. Bicara anggaran tentunya kan bicaranya tadi pendapatan sama apa namanya pengeluaran pagu anggaran, tiga kali rapat sama Ibu Menteri, tiga kali rapat sama RDP sama Eselon I, akhirnya hasilnya pun juga itulah dari awal sampai akhir.

Yang ingin kami sampaikan Bu Menteri, bahwa anggaran yang tidak berubah itu, yang berubahnya adalah pada Anggaran Inspektur Jenderal Inspektorat Jenderal dari 70,5 mencapai Rp93,29 miliar. Yang dipersoalkan oleh Poksi PDI Perjuangan adalah penambahan anggaran itu justru dengan

mengurangi 13 Eselon I dari anggaran 13 Eselon I rata-rata Rp1,75 miliar sehingga jumlahnya 22,75 itu dimasukkan ke Anggaran Inspektorat Jenderal.

Rapat-rapat yang silam yang hampir dipersoalkan semua poksi adalah bahwa keterkaitan dengan program 2023 itu adalah peningkatan neraca pemanfaatan sampah dan limbah semakin besar untuk bergulirnya ekonomi sirkular. Yang terjadi di rencana anggaran kita 2023 justru anggaran Ditjen PSLB3 itu malah yang terkecil Rp203,9 miliar. Artinya apa? Apa yang disampaikan oleh semua Poksi-poksi ini, tidak ada tidak ada penyesuaian. Padahal kami meminta dan persyaratannya tadi sebagaimana disampaikan oleh Fraksi Demokrasi itu terjadi peningkatan volume sampah dari tahun 2022 ke 2023 itu sampai 20 juta ton, tapi infrastruktur untuk menangani persampahan ini terabaikan, anggaran untuk menangani itu pun juga di malah terkecil dari semua anggaran yang ada di Kementerian LHK. Oleh karena itu, apa namanya pada momen-momen ini kiranya perlu ada satu penyesuaian.

Kemudian, dalam penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri itu di halaman 18 itu ya untuk apa namanya bahwa anggaran dari 9 dari Rp6,912 triliun itu, Rp3,329 triliun untuk dukungan manajemen, 6, apa namanya Rp3,6 triliun untuk apa namanya non operasional, diantaranya adalah untuk pengelolaan hutan berkelanjutan. Untuk pengelolaan hutan berkelanjutan anggaran didominasi untuk PDS PDASHR 1,035, sedangkan kerusakan hutan akibat pemanfaatan hutan berdampak pada dua Direktur Jenderal yaitu PDASRH sama KSDAE yang instan langsung menangani persoalan, bagaimana pemeliharaan hutan, bagaimana apa namanya ekosistem yang terjadi. Nah, untuk KSDAE untuk operasional hanya Rp562 miliar teranggarkan, bagaimana mungkin penanganan kerusakan hutan bisa segera terselesaikan. Oleh karena itu, apakah posisi-posisi anggaran itu tidak bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan, apalagi target capaian yang ingin dicapai tahun 2023 itu sekalipun terjadi penyesuaian anggaran di Eselon I tidak mengalami perubahan, bagaimana kemudian mencapainya untuk mencapai tujuan capaian di 2023 itu.

Demikian pula, dalam apa namanya anggaran untuk kualitas program. Kualitas lingkungan didominasi oleh anggaran pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kenapa, apakah itu tidak mungkin itu digeser kepada PSLB3 pada pengelolaan sampah dan limbah B3, orientasinya sama-sama meningkatkan lingkungan.

Yang terakhir, Bu Menteri. Untuk penjabaran anggaran kegiatan berbasis masyarakat agar juga kami juga bisa mengontrol, bisa mengikuti perkembangan di lapangan, mohon penjabarannya nominasi kegiatannya disampaikan pada kami sebagai Anggota sehingga tiap-tiap Dapil bisa terkontrol bagaimana realisasi anggaran apa namanya yang berbasis masyarakat ini.

Kami kita itu dari apa Poksi PDI Perjuangan.

Terima kasih.  
*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Baik, Terima kasih, Pak Sutrisno.

Selanjutnya Pak T.A Khalid, silakan.

**F-P.GERINDRA (Ir. H.T.A. KHALID, M.M.):**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh teman-teman Anggota Komisi IV yang saya banggakan, kemudian

Bu Menteri beserta Sekjen dan seluruh jajarannya yang kami muliakan,

Izinkan ini memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi ini sudah berulang-ulang, juga penjelasan dari Bu Menteri kita persingkat agar tidak berulang. Izinkan pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman Fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, dan masukan terhadap RKA K/L 2023 ini.

Yang pertama, Bu Menteri. Bahwa sebagaimana perubahan Renstra KLHK tahun 2020-2024 dan juga sebagaimana Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan itu Nomor 1 Tahun 2022 terdapat 3 skenario pendanaan tahun 2023 untuk mencapai Renstra. Dimana disitu skenario optimis itu anggaran sebesar 11 triliun sekian, kemudian skenario moderat sebesar 9,8, kemudian skenario *bestline* sebesar 8,5, namun faktanya anggaran kita hanya sekitar 6,9. Maka dalam kesempatan ini Fraksi Gerindra ingin mendapat penjelasan, ini skenario apa yang harus Ibu lakukan atau KLHK lakukan mengingat pagu anggaran tahun 2023 ini di bawah ini skenario yang sebagaimana yang dimaksudkan pada Permen LHK tahun 2022 nomor 1.

Yang kedua, kami Fraksi Partai Gerindra pada kesempatan ini memang mengapresiasi adanya peningkatan dan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ini kami dari Fraksi Gerindra mengapresiasi karena program berbasis masyarakat pada tahun 2023 ini menurut pengamatan dan catatan kami meningkat 159% atau menjadi Rp1,67 miliar dari tahun 2022, ini peningkatan yang luar biasa. Namun menjadi catatan juga Bu Menteri bahwa anggaran program dukungan manajemen KLHK tahun 2023 adalah sebesar Rp3,3 triliun atau sekitar 47% dari jumlah total usulan pagu anggaran tahun 2023. Dukungan manajemen terbesar terdapat pada Ditjen KSDAE yaitu sebesar 1 triliun Rp1,1 triliun atau sekitar 33% dari total anggaran dukungan manajemen KLHK. Fraksi Gerindra menilai persentase jumlah anggaran dukungan manajemen sekitar 47 ini masih terlalu besar, ini perlu perhatian Bu Menteri agar lebih diutamakan kepada program-program berbasis masyarakat seperti percepatan pelaksanaan perhutanan sosial, hubungan permasalahan pemasaran produk-produk masyarakat. Selain itu, Fraksi Partai Gerindra juga meminta penjelasan mengenai penggunaan dukungan manajemen kepada Ditjen KSDAE tersebut.

Kemudian yang terakhir, kami ingin mengingatkan dan menjadi perhatian Bu Menteri. Sebagaimana kita pahami bahwa Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dibentuk atas dasar Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 yang diberi tugas untuk melakukan percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada area restorasi gambut di 7 Provinsi dan pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 Provinsi. Fraksi Gerindra meminta perhatian dan penjelasan bagaimana dengan pengolahan kawasan gambut dan mangrove di luar wilayah kerja dimaksud tersebut. Misalnya di Aceh, mangrove BRGM tidak masuk, di Aceh juga punya gambut, di Aceh juga punya mangrove, ini menjadi perhatian. Karena banyak Provinsi lain juga yang di luar daripada ini harus menjadi perhatian kita, bila perlu bagaimana skema agar BRGM juga bisa masuk. Kalau tidak bisa masuk, apa solusi lain agar daerah gambut di luar skema 9 ini juga mendapat perhatian.

Saya pikir ini yang dapat kami sampaikan, pada prinsipnya kami sependapat dengan situasi anggaran kita hari ini. Namun terakhir, kami hanya bisa menyampaikan dan berharap bahwa walaupun anggaran kita yang terbatas hanya sebesar Rp6,9 triliun tentu ini sangat sedikit dibandingkan dengan luas hutan kita, tetapi saya pikir kami berharap bahwa dengan anggaran yang terbatas ini mari kita kerja tanpa batas. Mari kita optimalkan, mari kami berharap agar apa yang telah kita sepakati dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan amanah dan cepat. Dan kami berharap hari-hari kedepan balasan setiap pelaksanaan di Dapil mohon dilibatkan kami teman-teman Anggota DPR di Dapil.

Saya pikir ini yang dapat kami sampaikan.

*Billahi Taufik Wal Hidayah.*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Baik. Terima kasih Pak Khalid.

Selanjutnya Pak Hanan. Silakan Pak Hanan.

**F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.):**

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,  
Bu Menteri dan jajaran, Pak Wamen,

Pertama, tentunya apa yang sudah dibahas selama ini kita hari ini sudah nantinya berketetapan bahwa anggaran yang sudah kita bahas itu tentunya Fraksi Partai Golkar kami atas nama Fraksi Partai Golkar untuk memaklumi dan menerima serta mendukung sepenuhnya program-program yang telah diakomodir di tahun 2023.

Kami pada kesempatan ini ingin memberikan perhatian dan catatan-catatan terkait dengan pendapatan, Pendapatan Negara Bukan Pajak dari kawasan hutan khususnya yang bersumber dari pihak ketiga yang mengelola kawasan hutan, terutama hutan untuk hutan produksi. Untuk kita maklumi bersama, ini kebetulan kami dari Provinsi Lampung Bu, Ibu Maklumi untuk HTI-HTI kita itu kita sangat prihatin. Misalnya saja register 45 hampir dari 41.000 hektar hampir semuanya saat ini sudah diduduki rakyat perambah dan hampir kita lihat tidak ada tegakan di kawasan itu, begitu juga register 44, kemudian 44 Inhutani, 45 Silva Inhutani, kemudian 46, kalau register 40 sebagian sudah diberikan untuk Kota Baru ya.

Nah untuk itu Bu Menteri, saya kira perlu dievaluasi dengan diambil langkah-langkah ini sumber pendapatan, karena toh di lapangan itu ada sewa-menyewa lahan, penggunaan kawasan bukan untuk tanaman kayu-kayuan, bahkan untuk tanaman setahun bahkan semusim saja. Oleh karena itu, saya minta ada langkah-langkah untuk perbaikan ini. Kalau seandainya di Pulau Jawa itu Bu, ada kawasan hutan dengan pengelolaan khusus mungkin bisa kita terapkan di sana biar jelas statusnya. Biar jelas statusnya, rakyatnya ada di dalam situ, kemudian mereka kita berikan tugas-tugas nah sehingga fungsi kawasan hutan itu, fungsi hutan ya tetap ada sementara rakyatnya yang sudah terlanjur masuk itu bisa mendapat manfaat ekonomi di situ. Saya menyarankan ini, evaluasi total aja Bu, ini mungkin Ibu berkesempatan 2 tahun lagi nih masa jabatan Ibu bisa menyelesaikan ini, tentunya harapan kita seperti itu.

Nah kemudian yang kedua, terkait dengan program-program pembinaan masyarakat kawasan hutan. Ini kami mohon petunjuk juga apakah dimungkinkan gitu di hutan-hutan yang dikelola oleh pihak ketiga itu kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan di sana, misalnya kegiatan-kegiatan KBR, Bang Pesona dan sebagainya di masyarakat di kawasan hutan tapi hutannya yang dikuasai atau dikelola oleh pihak ketiga, ini mohon petunjuk ya apakah itu dimungkinkan dengan aturan yang ada.

Kemudian terkait dengan Bimtek, kami terima kasih ada cukup banyak Bimtek di 2023. Namun kami mengingatkan tolong dari masing-masing Eselon I ya untuk kawan-kawan ini diberi jangan menentukan pesertanya ya kadang-kadang ada beberapa Bimtek kami sudah disodorkan peserta tinggal kami diminta membukanya, padahal kebutuhan kita adalah selain kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat kita harapkan ada dampak ya dampak program-program yang kita laksanakan bersama LHK untuk masyarakat disekitar kawasan hutan.

Demikian yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih Pak Hanan.

Saya pikir ini bisa dikomunikasikan ya Pak Sekjen, Bu Menteri, untuk peserta, karena pasti teman-teman Komisi IV ingin mengawal itu dengan sampai selesai program-program yang berkolaborasi dengan KLHK.

Selanjutnya Pak drh. Slamet, silakan.

**F-PKS (drh. H. SLAMET):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan yang saya hormati,  
Bu Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, dan seluruh jajaran dari KLHK yang saya hormati,

Ada beberapa yang ingin saya sampaikan itu terkait dengan program, karena ini juga mengulang. Hanya memang catatan saya kemarin di rapat juga sama bahwa sampah hari ini menjadi program yang menjadi masalah yang yang luar biasa, memang tadi kalau ngobrol sama Mbak Kiki di undang-undang memang tidak masuk dalam kebutuhan dasar, tetapi ini sudah menjadi masalah besar dan anggarannya dikurangi. Sehingga saya ingin mempertanyakan nanti posisi yang tadi ngobrol di apa ada penyisiran yang di 200 M itu yang masih fleksibel dari penempatannya, apakah dimungkinkan nanti pengaturan bisa jadi sebagian Anggota yang memang komitmen terhadap apa persampahan penanganan sampah ini bisa jadi cenderung kemudian untuk ditambahkan ke sana menjadi program-program yang berbasis kemasyarakatan. Ini nanti mohon dijelaskan, kalau mungkin seperti itu sehingga nanti teman-teman yang memang berbasis apa kan tadi kalau Pak Sekjen menyampaikan masih fleksibel, nah ini hal-hal begini ini harus ada penjelasan.

Yang kedua, ini terkait dengan masalah umum, walaupun tidak terkait dengan apa anggaran. Saya ingin mendapatkan konfirmasi Bu Menteri yang lagi ramai terkait dengan pencekalan apa itu peneliti ya. Tentunya saya yakin gitu ya, pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang yang melindungi kepentingan nasional. Tetapi tentunya dalam forum yang resmi dan formal ini sekaligus juga menjadi hak kami untuk mengetahui sehingga kami mohon penjelasan apa, kenapa kemudian sampai terjadinya pencekalan ini, hal-hal apa yang memang apa sempat kemudian pelaku apa terjadinya pencekalan, kepentingan nasional mana yang kemudian dibocorkan itu sehingga kita juga bisa bersikap, dalam hal ini kami ingin mendengarkan itu.

Berikutnya, apa hal lain yaitu terkait dengan ekspor kayu ke China Bu Menteri. Kalau data yang saya dapatkan kan ini cukup paling tinggi gitu ya, sementara informasi yang saya terima juga Eropa itu impornya dari China. Nah apakah dari apa Eropa ke China dulu, China ngambil di Indonesia, atau memang itu kayu dari China. Apakah tidak mungkin juga kalau kemudian itu menjadi apa komoditi ekspor dari kita, kenapa tidak langsung kesana.

Nah, ini mungkin beberapa hal itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih Pak Slamet.

Selanjutnya Pak Haerudin. Terus maunya gimana, kalau kok kaget semua?

**F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H):**

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan, Anggota yang terhormat,  
Ibu Menteri, Bapak Wamen KLHK, Pak Sekjen, beserta seluruh Dirjen Eselon I, dan  
Mitra-mitra dari Kementerian dan Lembaga ada Perhutani, Inhutani, mohon maaf ini kalau kelewat mohon maaf,

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ibu Menteri, ingin kami sampaikan. Pertama-tama karena kita di Dapil ada masalah, dari banjir bandang jadi itulah banjir bandang tahunan sebagai catatan pertama karena kami kemarin dari daerah menengok semua data dikumpulkan dan kita memang coba mendiskusikan persoalannya adalah persoalan hulu air. Karena seluruh hulu air yang datang ke selatan semua sudah habis, gundul hutannya dan semua menjadi areal horti mohon untuk diperhatikan apa BPDASRH. Bagaimana hutanisasi lahan di daerah hulu itu harus di apa namanya lebih diperhatikan dan kemitraan kita dengan masyarakat lebih ditingkatkan, termasuk pengasuhan hulu air kita serahkan kepada tentara *nggak* apa-apa, daripada tentara ngawasin pupuk mending jelas kita bekerja sama ngamanin lingkungan. Masa' tentara diajak kerja sama urusan pupuk bisa, masa' kita ngamanin lingkungan *nggak* bisa, bisa dengan Kapolres setempat. Di daerah kita di daerah di sana itu ada 10, 10 sungai yang memang butuh dibenahi. Baru lalu kita banjirnya di kota, sekarang banjirnya di selatan dan itu dari satu dari hulu-hulu air yang memang semua belum maksimal karena memang belum ada perubahan. Dan mohon untuk jadi perhatian dari Ibu Menteri karena memang itu daerah hutan semua rusak, kenapa kita mendorong Gunung Cikuray menjadi taman nasional.

Dan kita juga buat catatan, izin tentang untuk geothermal yang ada di Papandayan juga butuh dievaluasi Pak Sekjen khawatir Ibu Menteri tidak *cover* atau tidak terprediksi bagaimana resiko nanti yang di Papandayan jadi geothermal yang karena statusnya turun jadi TWA mohon buat catatan-catatan yang lebih ketat, karena jangan sampai yang terjadi seperti yang di Cilawu tempo dulu. Katakanlah akibat dari situ, turun ke bawah, semua hutannya habis

jadi kebun jadi kebun horti, jadi kebun kentang, terus banjir, rumah warga rusak, *nggak* ada yang mau ganti. Yang mereka garap ladang-ladang itu dan menjadi kebun-kebun horti *nggak* mau ganti mereka itu dan mereka nyebutnya itu takdir, nah itulah jadi Tuhan yang salah kalau banjir itu, tidak tahu monyet itu yang salah itu padahal mah. Jadi yang merusak hutan itu kan *nggak* mungkin manusia, pasti monyet.

Yang kedua, Ibu Menteri. Kita ingin memberikan pikiran-pikiran kita terhadap proses RKA K/L kita karena kita punya perhatian yang khusus sekarang, pertama di bidang lingkungan. Walaupun memang kita melihat dari sisi kemampuan anggaran kita Rp6,9 triliun karena kalau dipecah berapa anggaran jadi mengecil dan kita butuh kebijaksanaan bagaimana sampah ini jangan terus-menerus jadi apa jadi bencana nasional apalagi sampah plastik, dan kadar kedewasaan atau kebijaksanaan dan kesadaran masyarakat kita memang sangat terbatas urusan lingkungan ini butuh didorong secara merata kerja sama. Bukannya persoalan membuat pabrik fabrikasi apa namanya sampah, tapi kesadaran terhadap sampah yang betul dikerjasamakan itu, tentu Bimtek ini memang butuh diseriuskan urusan sampah. Jadi masyarakat kita beri butuh diberi perspektif baru tentang sampah dan bagaimana itu kotoran itu bisa menjadi uang kan butuh didorong bersama-sama. Sekiranya masyarakat kita memahami bahwa sampah itu adalah bagian sisi lain dari uang Rupiah, Dolar, mereka akan menganggap bahwa sampah itu adalah sesuatu yang mahal dan istimewa. Tidak seperti hari ini, semua adalah sebuah yang menjadikan kotoran dan menjijikkan dan jadi masalah bagi kita semua.

Yang kedua Ibu Menteri, kita butuh yang lebih strategis di proses bagaimana hutan-hutan kita yang di daerah-daerah itu butuh diawasi betul, terutama di hulu-hulu air, kita bencana alam di mana-mana. Kalau hari ini kita masuk musim penghujan, debit air tinggi, dan banjir terjadi di mana-mana, pasti kita selalu menyebut ini anomali cuaca dan itu risiko besar bagi kita. Padahal, dari dulu juga mungkin bisa begini, karena sistem lingkungan yang memang rusak kita bisa sadari siapa yang merusaknya karena kita butuh bagaimana memperbaiki walaupun belum bisa maksimal tapi paling tidak kita sudah bisa menjalani. Dan kita berharap anggaran yang terbatas ini tepat sasaran Bu Menteri, bahwa bagaimana didorong beberapa titik yang lebih strategis, yang lebih berkaitan dengan kebencanaan-kebencanaan. Nah kira-kira catatan-catatan kita di anggaran ini karena ini sudah berapa kali kita bertemu, mudah-mudahan lebih baik.

Yang terakhir, saya ingin kepada Perhutani ingin catatan Pak Wahyu. Masalah yang lalu yang orang diadili, Pak Dirut Wahyu Perhutani ada ya. Apa wakilnya ya, Pak Dirutnya *nggak* hadir? *Nggak* apa-apa *nggak* penting Komisi IV *nggak* apa-apa. Catatan aja Pimpinan, Komisi IV *nggak* lebih penting bagi Dirut, nanti kita rekomendasikan ganti aja. Yang ini catatan kita adalah tentang bagaimana mereka itu adalah proses apa namanya pertimbangan-pertimbangan hukum itu adalah mereka adalah (*suara tidak jelas*) yang sifatnya (*suara tidak jelas*) bukan satu pohon. Pekerjaan siapa? Terus *sampeyan-sampeyan* kalian *nggak* pernah nengok keluarga, kalian tahu berkah ridho juga, kalian tahu siapa malingnya, siapa mafianya. Catatan untuk teman-teman di Perhutani, jangan dilakukan lagi yang begitu, kedzoliman itu akan kembali pada



kita bukan pada orang lain. Kita itu tidak akan pernah mati kalau kita belum mengalami kedzoliman yang sama kalau belum didzolimi yang sama. Kita tahu di mata kita, kita lakukan yang sama dan bermasalah. Saya sampaikan sebagai bentuk keprihatinan kita adalah dari sebuah kenyataan bagaimana kita menjadi bagian yang jadi masalah dalam persoalan hutan itu. Mohon Perhutani itu menata dirinya, jangan jadi masalah untuk yang lain, diperbaiki persoalan-persoalan yang lebih serius itu adalah bagaimana amanah pengelolaan hutan lebih ditingkatkan kemampuan.

Terima kasih Pimpinan. Terima kasih Bu Menteri. Dan semua yang hadir mohon maaf atas kalimat-kalimat yang dianggap salah, tentu kami maksud di atas sebuah yang baik, yang terbaik bagi sebuah bangsa, bagi negara kita, bagi kehidupan kita, bagi lingkungan kita.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih masukannya, tidak ada yang salah Pak Haerudin. Selanjutnya Eyang Endang, silakan.

**F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc):**

Baik.

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ibu Ketua kita yang cantik yang berulang tahun dan Bapak Ketua kita. Selamat ulang tahun yang pertama kali,  
Yang kedua Ibu Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen dan para Inspektorat Jenderal yang hadir,

Saya hanya ingin menindaklanjuti tadi usulan-usulan dari teman-teman mengenai sebaran kegiatan yang berbasis masyarakat. Saya sebagai Eyang Puteri ini prihatin Bu Menteri, karena baru saja kemarin masyarakat desa Cimacan dan LSM Surya Kadaka menghadap saya, saya diajak Bu Menteri ke Gunung Gede Pangrango, nah ternyata ada perusahaan nih Pak Sekjen yang sudah mulai menggarap dengan luas 59,22 hektar untuk dan telah mengantongi izin dari pusat untuk mengembangkan pariwisata di sana. Nah, ini kan ada kaitanya dengan anggaran yang dikemukakan oleh Bu Menteri tadi di 3 Direktorat Jenderal. Nah, saya ingin fokus ke sana, karena berdasarkan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam sudah keluar untuk memperoleh izinnya, tapi masyarakat di sana menolak Pak karena tadi mengubah ekosistem yang ada. Jadi sarang-sarang burung kita

yang sudah komplit itu Pak akan tergeser dan juga mengurangi daerah tangkapan air. Nah, saya khawatir ini, nanti anak cucu kita yang di Kota juga akan kebanjiran, karena sempadan di Sungai Cikundul dan Rawa Panjang yang merupakan habitat burung dan satwa langka akan dipangkas. Nah, juga kehadiran macan tutul kita ini akan hilang Pak, nah padahal itu sangat berpotensi sekali untuk wisata sebetulnya.

Nah kemudian masyarakat dan LSM Surya Kadaka ini meminta izin untuk dicabut Pak, tapi dipalsukan surat keterangan dari Pemdanya, nah saya melihat sendiri itu. Malah saya harusnya diajak, tapi naik motor Pak sebanyak sepanjang 5 km jadi saya *nggak* kuat. Nah, jadi Pak mohon perhatiannya Pak Sekjen dan 3 Direktorat Jenderal ini untuk mengantisipasi, karena Taman Nasional ini sudah ada SK-nya Pak dari pusat gitu, nah jadi mohon dilihat kembali, dievaluasi kembali. Nah PT dari kegiatan ini namanya PT Cibodas Puncak Nirwana yang merasa sudah disetujui oleh pusat, jadi arogansinya tinggi sekali.

Terima kasih Bu Menteri dan jajarannya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih Eyang Endang yang selalu semangat.

Terakhir pedalaman kakak Ansi.

**F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si):**

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Selamat siang, dan  
Salam sejahtera buat kita semua,

Ibu Menteri yang terhormat,  
Pak Wakil Menteri, Pak Sekjen, para Dirjen, Pak Kepala Badan, dan hadirin yang saya hormati,

Bu Menteri, ketika kita bicara soal anggaran tentu ada pendapatan dan ada pengeluaran. Saya pingin minta informasi salah satu sumber untuk pembiayaan ini kan adalah PNB, sampai 2022 hampir bulan Oktober ini kalau boleh tahu PNB kita itu sudah ada di angka berapa Bu. Nah sehingga kita tahu, jangan sampai nanti PNB kita besar, tetapi anggaran yang diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini tidak proporsional.

Yang kedua, terkait dengan Dana Alokasi Khusus. Kami melihat DAK fisik bidang Lingkungan Hidup tahun 2023 itu ada di angka Rp2,25 T dan DAK fisik bidang Kehutanan ada di angka Rp1,75 T total ada Rp4 triliun. *Item-item* yang disiapkan dalam bidang persampahan itu mulai dari pembangunan pengelolaan sampah, pusat daur ulang sampah, sampah induk, rumah kompos, dan seterusnya. Demikian juga terkait dengan bidang Kehutanan *stressing*-nya pada rehabilitasi hutan dan lahan. Kami ingin mendapatkan informasi Bu, kira-kira ini sebarannya di mana saja baik dalam bidang DAK fisik Lingkungan Hidup dan Sampah maupun juga DAK fisik di bidang Kehutanan dan Rehabilitasi Lahan.

Yang ketiga, kalau kita bicara DAK disana melibatkan sejumlah institusi antara lain Bappenas, Kementerian Keuangan, pemerintah daerah dan juga kementerian teknis. Kalau kita sebut di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Kalau boleh, Bu untuk kedepan kami Komisi IV ini juga boleh diajak untuk juga bicara Bu soal DAK ya, jangan sampai nanti kami baru tahu ketika sudah menjelang diketuk palunya, ya karena diskusi-diskusi kita ini kan sebagian besar atau utamanya itu kan bicara mengenai Lingkungan Hidup dan Kehutanan kita pingin agar proses diskursus di Komisi IV dan juga mitra kerja KLHK ini itu juga antara lain tercermin melalui DAK-DAK ya yang tersebar di seluruh Indonesia di pemerintah daerah ini sehingga kami pun tidak gelap gulita Bu. Jadi ini Mungkin bagian dari transparansi dalam proses perencanaan dan perumusan program DAK, dan juga mungkin kami juga bisa ikut nanti mengawal kalau DAK ini sudah dilakukan ataupun sudah diimplementasikan.

Yang berikut, terkait dengan kegiatan berbasis masyarakat. Secara pribadi saya memberi apresiasi Bu, karena saya lihat dari ada 10 ya terkait dengan Direktorat Jenderal dan juga Badan yang ada di KLHK itu angkanya mencapai Rp1,67 T. Bicara kegiatan berbasis masyarakat ini, kami Komisi IV punya *concern* dan kepedulian yang kuat di sana, karena tentu ada agenda pemberdayaan rakyatnya, ada agenda pendampingan buat rakyatnya, ada agenda pelibatan rakyatnya, bahkan ada agenda edukasinya buat rakyat. Apakah mungkin kami sebagai wakil rakyat ini, yang juga terus terang kaki-kaki kami ini ada di daerah bisa juga untuk bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini Bu? Karena pembangunan ini kan berbasis rakyat nih. Nah, kalau kami politisi ini terus terang Bu, yang diinginkan itu selain merakyat juga prorakyat Bu kan begitu. Ya kalau merakyat ya datang peluk-peluk rakyat *nggak* ada jarak Bu, kalau prorakyat kan ya kita pastikan agar orientasi kebijakan ini berpihak pada rakyat. Dan secara pribadi saya melihat kegiatan berbasis masyarakat ini, ini sinkron dengan apa yang menjadi konsen dan juga komitmen kami buat rakyat.

Yang berikut, terkait dengan soal TORA. *Pasca* pemberian akses lahan melalui Tora dan Perhutanan sosial ini, menurut kami perlu dibuat semacam peta jalannya Bu, ya, agar masyarakat yang menerima akses lahan tersebut ini bisa kita pastikan mendapatkan manfaat Bu. Yang menjadi kekhawatiran saya adalah jangan sampai lahan-lahan yang dijadikan perhutanan sosial, kemudian tidak memberikan manfaat buat masyarakat. Padahal sejatinya tujuan utamanya itu adalah manfaat atau benefit buat masyarakat, nah jangan sampai

justru perhutanan sosial ini misalnya dijadikan sebagai lahan untuk misalnya nanam sawit oleh korporasi dan seterusnya, nah ini perlu ada kepastian.

Ibu Pimpinan, Selamat ulang tahun, sehat selalu, sukses, semangat terus. Saya kembalikan ke Ibu Pimpinan.

Terima kasih.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Baik.

Terima kasih kakak Ansi. Terima kasih doa-doanya.

Kanjeng, silakan. Setelah ini Bang Rudi.

**F-P.GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):**

Terima kasih.

Bu Pimpinan, teman-teman, Bu Menteri dan Pak Wamen, dan teman-teman semua yang hadir,

Saya menyampaikan hal yang saya kira sebetulnya mungkin Ibu sudah tahu bahwa tindak lanjut Undang-Undang 5/90 Supresnya sudah keluar, yang ditugaskan adalah Menteri Kehutanan LHK, Pertanian, dan Kelautan. Dan saya informasikan Bu karena ini inisiatif DPR, di DPR ini *Alhamdulillah* DIM-nya tanda petik sudah siap dan itu narasumbernya dari berbagai perguruan tinggi, pakar-pakar konservasi, lingkungan dari UI, ITB, IPB, Gajah Mada dan seterusnya, dan juga para LSM.

Nah, maksud kami begini Bu. Saya kira harapan kami karena ini undang-undang ini sudah tinggal pembahasan dan perlu pada saat kami RDP dengan Menteri Pertanian dan Menteri KKP ada berapa hal yang saya sampaikan karena Undang-Undang 5/90 kan Konservasi Sumber Daya Alam dan sampai Laut gitu. Nah, saya berpikir pengalaman yang lalu itu saya dengar juga *nggak* enak, antara kepentingan KLHK yang mengeluarkan izin dijegat oleh KKP sampai Presiden turun tangan. Ini kedepannya saya kira ya untung Menteri Kehutanannya yang ngalah gitu ya, tapi ngalah untuk menang ternyata ya gitu. Jadi maksudnya gini Bu, jadi Undang-Undang KKP itu karena dia adalah pelaksana di lapangan sedangkan *focal point* itu ada di Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, semua satwa, tumbuhan, dan ikan yang dilindungi itu adalah otoritasnya di Kehutanan itu syarat rekomendasi kami. Tapi dalam perizinan, misalkan Arwana, kuotanya dari kehutanan yang mengeluarkan izin mungkin KKP. Namun demikian KKP juga belum siap Bu, UPT-nya itu sangat-sangat sangat butuh *nggak* seperti di Kehutanan, ngurus Gajah sama Harimau aja Eselon II. Di Sumatera Bu, ngurus bibit ikan se-Sumatera Eselon III, jadi sangat sulit itu di KKP itu uang itu sentralistik gitu. Ini yang perlu jangan sampai terjadi kita melimpahkan kewenangan tapi seperti yang pernah kita berikan sampai sekarang belum dievaluasi di KKP, saya kira Pak Bambang tahu itu. Ini perlu dalam pertemuan.

Yang kedua, jangan sampai seperti peristiwa yang lalu karena egonya KKP Buaya itu masuk ikan Bu. Kami sendiri waktu itu di Veto ya ya kalah, tapi begitu banyak masalah buaya kembali ke hutan lagi, *nggak* mau menangan. Begitu buaya keluar dari lingkungannya bermasalah, akhirnya teman-teman KSDAE yang menangan gito, nah ini yang perlu digaris bawahi. Juga ini ada lucu lagi Bu, KKP Menteri mengeluarkan SK mengenai ikan yang dilindungi, itu kan PP Bu. Jadi akhirnya itu orang dianggapnya kalau yang diluar baca saya diingatkan SK Menteri melarang ikan-ikan tertentu yang dilindungi itu kan PP ya, ini ini contoh.

Juga yang kedua, Pertanian Bu. Pertanian sarang burung di alam itu tanggung jawab KSDAE, tapi yang budidaya ternyata sekarang produksi menurun karena tidak memikirkan kelestariannya Bu. Tidak ada siklus 1 putaran sarang burungnya tidak dipanen, ini dipanen terus akhirnya burungnya *nggak* ada sarangnya hilang Bu ini, ini sebetulnya makanya kuotanya tetep di Kehutanan ya. Jadi saya mohon kepada Bu Menteri karena kami mungkin tanggal 5 reses ya, jadi selama satu bulan dibahas oleh tiga Kementerian, *nggak* ketemu tim kita yuk bisa cepat. Dan informasikan bukan 50% berubah Bu, itu 30% itu pidana Bu. Jadi mungkin teman-teman di KLHK tolong digabung yang 30% itu banyaknya pasal-pasal rinci banget, mungkin jadi gabung lagi Pak Bambang ya digabung sehingga harusnya misalkan ada 30 Pasal tinggal 15 pasar Bu itu, itu yang pertama.

Yang kedua Bu, ini ada titipan. Kemarin Bareskrim tangkap kayu di Lubuk Raya di PT Sumber Mandiri, ini sampai di mana Pak Roy ini ya. Apakah itu punya HPH atau industrinya gelap atau ilegal itu, itu satu.

Yang kedua ini ada pertanyaan lagi. Di Kalimantan Selatan ada HGU dari areal Inhutani II 8000 hektar tanpa persetujuan Menteri Bu, ini betul *nggak* ini? ini katanya udah dilaporkan ke KPK, 8000 hektar, arealnya Inhutani II, keluarnya HGU tapi tidak ada rekomendasi dari KLHK. Ini sudah dilaporkan ke penegak hukum termasuk ke KPK.

Demikian Bu Pimpinan.

Terima kasih.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Baik.

Terima kasih, Pak Darori.

Memang surat dari Presiden sudah, kita sudah terima di kementerian juga ada 4 atau 5 kementerian yang terkait, 4 ya, untuk didiskusikan. Kami juga tadi juga sudah diskusi antar Pimpinan, Bu Menteri juga bahwa nanti di Masa Sidang yang akan datang kita akan *godog* itu konsentrasi untuk *menggodognya*. Nah tapi sebelum itu, bener kata Pak Kanjeng bahwa mohon untuk didiskusikan, kami juga akan tim dapur kami juga akan melihat itu secara lebih detail lagi.

Selanjutnya Pak, Bang Rudi jadi apa *nggak*.

**F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):**

Jangan gitu dong Bu Ketua tanyanya.

Terima kasih, Bu Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Bu Menteri, Pak Wamen, Sekjen, dan Pak Dirjen, Bapak Ibu Dirjen yang saya hormati,

Teman-teman sekalian,

Saya masalah TORA, Bu Menteri dan Pak Wamen Tanah Objek Reforma Agraria, saya bersyukur dan berterima kasih ya khusus di daerah pemilihan saya sejak saya ada di sini hampir sekitar enam ribuan lebih ya lokasi yang disampaikan oleh saya berupa sertifikat ini dan ini sangat bagus sekali untuk masyarakat di mungkin seluruh Indonesia mengharapkannya dengan adanya program TORA ini sangat bagus sekali. Jadi yang tidak mungkin melebarkan lahannya hanya karena itu mereka bersyukur, jadi saya apresiasi. Saya minta kepada Ibu Menteri dan Pak Wamen serta Sekjen, agar program ini bisa dilanjutkan mulai dari sekarang dan mungkin tetap seperti prosedurnya dari awal, artinya dari yang kecil dari desa, kecamatan, sampai dengan ke atas. Terutama di daerah pemilihan saya, di NTB I di Pulau Sumbawa.

Kemudian masalah DAK juga Bu Menteri, Pak Wamen, dan Pak Sekjen, Bu Dirjen dan Pak Dirjen. Saya mungkin juga mengharapkan untuk di daerah pemilihan saya untuk penentuan dan klausul yang bisa masuk di DAK itu, saya kemarin di beberapa kegiatan ada kegiatan yang memang harus ada di DAK. Nah, ini saya biasanya jarang menyampaikan ini, tetapi karena dibawah masyarakat khususnya di jajaran Ibu Menteri dan di Kehutanan di bawah itu bawah ini ada di alokasi DAK. Oleh karenanya, saya juga menyampaikan sebagai aspirasi dari bawah agar DAK mungkin masih ada waktu agar bisa ditinjau untuk di daerah pemilihan saya di Nusa Tenggara Barat I, Pulau Sumbawa.

Yang ketiga, saya berterima kasih juga adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah. Saya sampaikan ini bagus sekali ya kalau saya menyampaikan kepada pesantren-pesantren, hanya saja mungkin Pak Sigit ya, Pak Sigit, Pak Dirjen yang menangani IPAL ini agar spek, spek pintu ya, spek pintunya harus yang kokoh, harus yang kokoh, kenapa? Karena adek-adek siswa atau santri itu kan keluar-masuk keluar-masuk, kita maunya tetap tertutup rapi dan bagus sekali. Untuk di kampung lihat IPAL itu sangat luar biasa, ada pesantren dan lain-lain, tapi ada Instalasi Pengolahan Air Limbah ini sangat bagus sekali. Saya hanya koreksi kepada pintunya saja, pintunya jangan yang *stainless* yang sekali banting langsung lepas dia, jadi *nggak* enak itu pintunya disandar pakai batu gitu. Nah jadi itu, pada prinsipnya IPAL, TORA, dan daerah pribadi saya sebagai Anggota DPR Komisi IV daerah pemilihan sangat bagus sekali.

Saya kira itu. Saya juga menyampaikan kepada Ibu Ketua selamat milad, semoga diberkahi umur panjang dan selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas. Terima kasih Bu Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, dan Dirjen.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*  
Terima kasih, Bang Rudi.

Tentang DAK terutama 2024 kemarin waktu rapat kita tanggal 13 September kalau *nggak* salah ya, sebentar saya cek, tanggal 13 September itu juga sudah kita bicarakan bahwa apa untuk Bang Rudi sama kakak Ansi bahwa kita Komisi IV mendukung pengembangan mekanisme dalam rangka efektivitas usulan dana DAK, ini kan hasil rapat kita Raker ya sama Bu Menteri waktu itu ya tanggal 13.

Selanjutnya Pak Hermanto, silakan. Ini yang terakhir atau *nggak* ya.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):**

Datanya ada di Bu Ketua siapa yang terakhir.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pimpinan, Anggota Komisi IV, BU Menteri bersama jajarannya,

Pertama saya ingin menyampaikan bahwa Pendapatan Negara Bukan Pajak ya di KLHK ini memang cukup besar ya, itu sebesar kurang lebih Rp5,8 triliun. Kemudian anggaran untuk 2023 ini dirancang sebesar Rp6,9 triliun. Saya melihat proporsionalitas antara pendapatan bukan pajak dengan alokasi anggaran di KLHK ini sebenarnya tidak cukup adil gitu, semestinya alokasi anggaran. Saya melihat bahwa usaha dari Kementerian untuk meningkatkan penghasilan bukan pajak ini suatu pekerjaan yang luar biasa, tapi kenapa alokasinya tidak sebesar yang kita harapkan. Jadi saya minta Bu Menteri supaya ini bisa dibicarakan dengan Pak Presiden dan juga Menteri Keuangan untuk bisa ya orang sudah kerja keras diberi apresiasi gitu Bu Menteri, jadi supaya anggaran di KLHK ini bisa lebih leluasa kita untuk bisa mempertahankan hutan kita dan meningkatkan reboisasi, dan juga mencegah kebakaran. Jadi saya ini sebenarnya juga memberikan apresiasi atas kerja Kementerian ya untuk bisa meningkatkan penghasilan bukan pajak.

Kemudian yang kedua, saya juga berharap alokasi anggaran untuk DAK itu program-programnya itu untuk di daerah tadi Dapil Anggota itu bisa dikomunikasikan dimana saja gitu, kemudian kapan saja pelaksanaannya, kemudian kelompok mana saja supaya kita bisa mengikuti perkembangannya,

karena itu adalah tugas Anggota DPR untuk melakukan pengawasan. Saya sudah mungkin yang keberapa kali nih termasuk Anggota yang ada juga, itu menyampaikan supaya program-program yang berkaitan dengan DAK ini dikomunikasikan dengan Anggota sehingga kita tahu betul apakah efektif atau tidak yang dikerjakan di daerah itu. Kita khawatir kalau misalnya DAK itu digunakan tidak sesuai dengan tepat gunanya tentu akan kita sia-sia membuang anggaran saja disitu. Jadi sekali lagi saya minta supaya ini mohon dikomunikasikan, bila perlu pada saat misalnya memulai daripada program atau kegiatan yang berbasis DAK itu Anggota Dewannya diajak untuk hadir gitu sehingga kita betul-betul bisa memantaunya.

Kemudian yang ketiga, saya hanya mengulang lagi nih Pak Wamen udah berkunjung ke Sumatera Barat saya memberikan apresiasi lah ya atas perhatian KLHK ke Sumatera Barat. Tapi saya ingin juga Sumatera Barat itu tercermin juga kebijakan di pusat ini bahwa hutan di Sumatera Barat itu perlu juga pembinaan yang luar biasa melalui anggaran-anggaran yang tersedia di pusat. Nah, ini juga ada kearifan juga dari pusat supaya kita juga bisa menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat di sekitar hutan di sana, karena di situ masih banyak penambang-penambang di dalam hutan Bu Menteri, Pak Wamen, sepanjang pinggir jalan utama itu selalu ada longsor dan kita saksikan dibalik itu selalu ada ya *illegal logging* dan Bapak Wamen mungkin perlu juga dicermati pola *illegal logging* itu beda dengan yang dulu dengan yang sekarang. Kalau dahulu, *illegal logging* itu diangkut dengan truk yang terbuka, terbuka dia truk besar iya kan gelondongan, kelihtan, masyarakat juga tahu bahwa itu kayu yang dibawanya. Tapi sekarang itu polanya adalah menggunakan kontainer yang tertutup ya, orang biasa *nggak* bisa lihat, lalu lalang di situ *nggak* ada yang mau tahu siapa di situ. Nah, saya pikir ini perlu pola tersendiri untuk mengawasi *illegal logging* di Sumatera secara keseluruhan, sebab truk-truk besar itu lalu lalang di situ Pak, kadang-kadang jungkir balik, masyarakat tahunya bahwa itu bawa kayu itu setelah truk itu jungkir balik gitu ya terus berserakan gitu kan. Ini perlu lah strategi baru untuk memantau *illegal logging* di sana.

Kemudian terakhir, setelah dilakukan Bimtek ya PSLB3 masyarakat di sana yang peserta itu menyampaikan terima kasihnya karena mereka mendapatkan informasi yang jelas tentang apa yang harus dilakukan untuk hutan disekitar mereka. Nah, ini menurut saya Bimtek-bimtek seperti ini, ini harus mencerahkan, mencerdaskan, sehingga masyarakat itu bisa membedakan mana ini hutan hutan lindung, mana hutan yang bisa digarap, mana yang segala macam sehingga mereka tidak ragu lagi dengan apa yang dilakukan disekitar hutan itu.

Terakhir, ini terkait masih aspirasi untuk membuka jalan dari Lubuk Minturun ke Paninggahan, cuma jalan setapak sudah nyambung tuh Bu Menteri ya. Jalan setapaknya udah nyambung ya, nah kita berharap jalan ini adalah jalan alternatif karena Jalan Sitinjau Lauik itu bila terjadi disitu kemacetan total karena ada longsor yang hampir tiap sore ada longsor itu, badan jalan itu pun juga bisa tergerus itu. Nah, itu *nggak* ada lagi jalan di situ.



**MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):**

Namanya apa Pak, kami catat Pak.

**F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):**

Ya, dari Lubuk Minturun ke Paninggahan, Lubuk Minturun-Paninggahan, ya Kota Padang ,Kota Padang Bu. Saya mengharapkan Pak Menteri kunjungan kemarin itu sudah dapat informasi di situ, Bu Bu, Pak Wamen, maaf, Pak Wamen. Itu pasti sudah ada dapat informasi. Nah semoga ini ditindaklanjuti karena itu sangat ekonomis untuk mendukung mobilitas ekonomi masyarakat.

Demikian Bu Ketua.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M. / F-PKB):**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih.

Saya sudah memberikan informasi kembali bahwa bicara tentang DAK rapat itu kita lebih detil malahan hasil, hasil Rapat Kerja itu detil bahwa tidak hanya tentang usulan tetapi pengembangan mekanismenya pun juga dibicarakan antara Komisi IV dengan KLHK, itu rapat hasil rapat tanggal 13 September Pak. eh, iya kan September ya, 13 September 2022. Sampai bulan Februari di situ tertulis sampai bulan Februari masukan dari Komisi IV akan dibicarakan bersama-sama dengan KLHK. Jadi tinggal beberapa bulan kita siap-siap.

Saya pikir itu Bapak Ibu semua.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Sedikit.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Sedikit.

Oke. Baik, silakan.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Kemarin saya di Banggar, sedikit saya protes terhadap alokasi DAK penugasan sehingga itu saya menjadi catatan bahwa alokasi DAK penugasan memperhatikan usulan dari kementerian/lembaga dan saya protes Bappenas dengan dana perimbangan, sehingga catatan itu saya minta kasih masuk. Tapi jawaban mereka bahwa DAK penugasan itu alokasi anggarannya ke daerah itu

betul-betul berdasarkan usul Kementerian/Lembaga. Jadi ini juga mau jadi apa namanya, jadi saya katakan, siapa yang berbohong? Iya, siapa yang berbohong, anda yang berbohong atau di rapat-rapat kami di Komisi IV. Dia mengatakan, tidak Pak, kami memperhatikan apa yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga. Jadi ini juga tidak tahu, siapa, karena di KKP kemarin mengatakan bahwa seluruhnya ditentukan oleh Bappenas dan Keuangan begini juga di KLHK, tapi mereka mengatakan setelah ini. Jadi perlu ini di *clear*-kan ya, supaya jangan kita saling salah pengertian.

Terima kasih, Pimpinan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Iya. Itu poin yang penting jadi biar diklasifikasi atau bahasanya Pak SDK di *clear*-kan sehingga tidak ada dusta ya tidak ada dusta, tidak ada dusta Kang Dedy diantara kita, katakan sejujurnya.

Bu Menteri, silakan untuk merespon semua tanggapan dari. Pak Alimin, oh udah sehat, *Alhamdulillah*. Silakan, Pak Alimin.

**F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):**

Teman-teman Anggota Komisi IV yang saya hormati,  
Bu Menteri, Wamen, dan seluruh jajaran yang hadir,

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Saya kembali mengingatkan Bu, kita mau menyarankan agar rakyat di sekitar lokasi hidup gajah ini memberikan tanaman atau mau buat pola tanaman mereka yang kalau bisa istilah kasarnya tidak disukai oleh gajah, jadi lebih aman. Tapi kalau kita cuma mensarankan, saya kira mereka sudah bertahan lama, Pak. Nah pengalaman-pengalaman yang pernah ada di Kehutanan untuk LHK seperti di Aceh atau di mana atau di negara lain. Saya kira perlu kita berikan yang lebih langsung tuntas itu supaya kalau kita tahu bibit tanamannya dari mana, cara menghidupkannya bagaimana, dan apakah memang betul mempunyai nilai ekonomis buat mereka kalau *nggak* rakyat *nggak* akan terima. Kalau tidak, ya kita bikin macam-macam itu cuman sekedar waktu saja akan dihancurkan lagi oleh gajah, gajah itu bangunan rumah juga dia tabrak kalau dia sudah lapar. Jadi menurut saya, kalau kita sudah kewenangannya ini membuat apa kewenangannya itu, tapi jangan berikutnya itu supaya mencarikan tanaman yang betul-betul memberikan nilai ekonomis buat rakyat disekitarnya tapi juga ya tidak diminati oleh gajah, jadi gajah yang *nggak* adil, di samping kita menyiapkan tanaman yang disukai gajah ditempatnya.

Kalau menurut pendapat yang jawaban pertanyaan saya waktu itu, katanya masih memenuhi nih sekarang gajah di sana. Karena saya juga siapa yang meneliti ini bahwa pakan yang di dalam itu sekarang masih untuk cukup untuk 300-350 ekor gajah, sedangkan yang ada di sana kalau tidak salah dibawah 200 Bu ya saya *nggak* tahu persis karena *nggak* tahu. Nah, menurut

saya kalau memang betul dia masih buat, mungkin tidak akan sampai tiap hari rakyat teriak desa jadi kacau oleh gajahnya karena dia lapar. Nah, jadi untuk selanjutnya kalau bisa ya kita punya langkah yang yang jelas lah untuk menyelamatkan gajah ini dan juga menyelamatkan tanaman rakyat disekitar. Bisa juga karena kita punya teknik-teknik untuk mengatasinya, tetapi juga betul juga barangkali urusan mereka juga tanaman yang cocok yang hidupnya bagus buat petani tapi juga tidak disukai oleh gajah. Nah, itu yang pertama Bu.

Yang kedua, saya juga berharap ini saya baru dengar ini. Ketika kita berhadapan orang di luar negeri, itu kalau hutan kita kebakaran, itu kan semua kita yang salah. Padahal saya baru tahu ada yang sudah ulang tahun ke-30 kemarin Manggala Agni belum ada yang diangkat, padahal dia ujung tombak kita. Nah kalau bisa apa yang Ibu rencana mengusulkan betul-betul berhasil, jangan ya bukan saya menganggap asal-asal usul saja. Tapi betul-betul memang target kita minimal dalam periode ini betul mereka diangkat setelah sekian tahun selalu kita tugaskan untuk, kalau mereka gagal pasti semua kita yang disalahkan. Padahal mereka yang dijadikan terutama kurang, bisa juga menilai kita itu mereka juga menilai kita kurang serius terhadap nasib mereka. Karena hal-hal seperti ini di Indonesia biasanya agak susah itu Bu Ketua, honorer-honorer, apalagi pegawai yang belum diangkat, ini belum pernah diangkat ini Pak. Nah, bayangkan sekian tahun berapa pun mulai dari anggaran kita dari yang besar sampai yang kecil lama-lama tambah menurun, tambah kecil harapan para petugas depan kita ini. Saya kira itu saya juga sendiri *nggak* tahu jumlahnya berapa justru yang direkrut dalam keadaan, ada 3000? 7.000, nah itu *nggak* main-main itu mengangkatnya. Jadi, sementara kita masih punya hutang untuk para guru honorer dan segala macam. Jadi menurut saya di bidang Kehutanan ini saya ingin betul menapak lah kita, kalau bisa di dalam, kalau *nggak* bisa dalam 1, 2 tahun ini langsung keputusan pemerintah harus disahkan kita agar diperhatikan kan nasibnya, itu yang saya harapkan.

Nah yang ketiga, soal DAK tadi saya menarik itu. Mudah-mudahan betul itu yang disepakati tadi, karena waktu saya lihat waktu itu memang *nggak* ada ke tempat kami walaupun kami bertiga yang di Dapil II. Ini Pak Hanan waktu itu *nggak* ada dan Bu Dwi, mudah-mudahan dengan ada kesepakatan yang terbaru itu bisa diperhatikan. Karena juga banyak hal yang harus dilakukan juga barangkali dengan DAK itu untuk ya menghindari kerusakan lingkungan dan macam-macam juga apa limbah segala macam juga *nggak* kurang di Lampung itu.

Saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan Bu Menteri dan Ketua.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih, Pak Alimin.

Silakan Ibu Menteri untuk memberikan tanggapan, semua respon dari Bapak/Ibu Anggota.

**MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):**

Terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati Wakil Ketua yang terhormat Ibu Anggi,  
Pimpinan yang terhormat Pak Dedy,  
Yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota,

Saya menyampaikan ucapan terima kasih atas catatan-catatan dan mohon izin nanti tertulis kami persiapkan, namun secara umum saya ingin menyampaikan beberapa hal.

Pertama, secara umum anggaran yang ada ini polanya kita melakukan optimalisasi, jadi KLHK sebetulnya juga punya tugas prioritas nasional jadi kita mengarah ke sana dan prioritas berikut adalah kegiatan yang terkait masyarakat. Oleh karena itu, agenda-agenda yang berbasis masyarakat dari catatan yang terhormat Pimpinan dan Anggota menjadi sangat penting dan kami berterima kasih untuk hal tersebut.

Kemudian berkaitan dengan manajemen, ini memang cukup besar karena memang pegawainya KLHK banyak banget ya hampir 20.000-an. Di samping pemeliharaan gedung dan aset, KLHK punya mungkin hampir 300 UPT, 270-an UPT dan juga untuk kegiatan operasional, administrasi, dan lain-lain.

Tentang kegiatan berbasis masyarakat dan tadi diangkat oleh yang terhormat Bapak Slamet soal fleksibilitas anggaran. Saya akan minta Pak Sekjen dan Ibu Irjen untuk melihat, sepanjang proses fleksibilitas itu tidak mengubah undang-undang Bapak, nah itu kita saya kira sedapat mungkin harus diartikulasikan, jadi itu sebetulnya tadi yang dimaksud oleh Pak Sekjen ya Pak ya. Jadi nanti saya setuju catatan yang terhormat Ibu Anggi bahwa berbagai hal itu harusnya dikomunikasikan saja, ini ini nanti kita akan melangkah.

Kemudian saya mohon izin, ini dapat catatan bahwa PNBK KLHK totalnya tahun 2022 Rp5,54 triliun dan sekarang sampai dengan September sudah Rp3,92 triliun Pak Ansi jadi udah 71%. Khusus PNBK penggunaan kawasan hutan dari target 1,87 sudah, eh dari target 1,77 sudah tercapai 1,87, jadi jadi sudah apa namanya melebihi.

Tentang DAK, kami berterima kasih, memang akhirnya yang dibutuhkan adalah proses politik Bapak Suhardi Duka yang terhormat kami mohon titip begitu proses politiknya akhirnya kuncinya. Karena kalau di eksekutif tuh ya namanya eksekutif *order*, jadi pemerintah. Usulan yang kami cantumkan itu *dua koma sekian triliun* dan *satu koma triliun* itu usulan, tetapi pagunya yang muncul kan cuman Rp350 miliar. Itu sebabnya di Raker yang lalu yang terhormat Pak

Ketua mengatakan, ayo dilihat bareng-bareng sampai dengan akhir tahun usulan untuk 2024 itu bagaimana.

Bu Anggi yang terhormat, saya mohon izin melaporkan saya ngintipin juga DAK Kesehatan, ternyata prosesnya itu bulan Februari sudah kurang lebih selesai Pak Ketua, jadi kita berarti musti lebih cepat menyiapkan itu. Dan kami berterima kasih bahwa kita akan khusus juga membicarakan soal bagaimana mekanismenya, jadi kami dengan Kementerian Bappenas, Mendagri, dan Keuangan membicarakan ini, tapi saya juga minta tolong proses politik yang di Komisi IV dan Badan Anggaran. Jadi, sekali lagi terima kasih.

Saya setuju untuk evaluasi beberapa hal tadi Pak Hanan yang terhormat register 44, 45, 46 ya Pak Dirjen, di sini ada Dirjennya. Kemudian juga yang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang swasta Pak Sekjen ya nanti disiapkan kita langkah-langkahnya ataupun kalau udah ada hasilnya sebetulnya di lapangan seperti apa kita akan laporkan secara tertulis.

Kemudian soal komposisi anggaran, sebetulnya kita bisa melihatnya sekarang ini *nggak* terputus per Direktorat Jenderal, sebab contohnya misalnya pemulihan ekosistem. Jadi si KSDAE juga sebenarnya dapat dukungan DAS misalnya seperti itu, atau KSDAE juga sebetulnya untuk pengawasan dapat dukungan juga dari Gakkum, jadi jadi ada *cross*, makanya di halaman itu ada yang bunyinya program-program dan lain-lain.

Untuk TORA dan PS kami perhatikan catatan, tetapi ada perbedaan antara TORA dan Perhutanan Sosial. Bedanya adalah kalau TORA itu tanahnya dilepas dari hutan, lalu menjadi sertifikat sebagaimana program reforma agraria bersama BPN Menteri ATR jadi *Land Ownership*, jadi sekarang kita sudah siap 2,8 juta hektar dari target 4,1. Tapi kalau Perhutanan Sosial itu bukan *land ownership* tetapi *Land Holding*, petaninya boleh pakai boleh *holding* begitu selama sekian tahun, 35 tahun boleh diperpanjang dan sebagainya, sekarang sudah lebih kurang 5,1 juta dari 12,7. Yang tadi tepat sekali yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Ansi bahwa selain akses harus ada kesempatan berusaha, harus ada manajemen dan lain-lain yang didampingi kepada kelompok masyarakat.

Kemudian kasus-kasus dan catatan-catatan nanti kami akan jawab tertulis Ibu Ketua yang terhormat, Pimpinan yang kami hormati.

Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc):**

Bu Ketua, saya izin, mumpung masih ada Ibu Menteri.

Bu Menteri, baru saja saya di wawancara tentang Ibu melarang peneliti-peneliti asing untuk meneliti di Indonesia. Nah, tadi saya mendukung asalkan tadi, harus didampingi peneliti asing itu.

Dan yang kedua, peneliti asing juga harus diberi sosialisasi tentang keadaan kita, karena banyak sekali juga peneliti asing yang mengatasnamakan oknum-oknum tertentu terus mengambil plasma nutfah kita, seperti yang Ibu pernah alami sendiri tentang Shiseido itu Bu. Jadi tadi saya kemukakan, saya mendukung sekali usulan Ibu untuk melarang, tapi tadi tidak melarang secara total, hanya perlu didampingi dan diawasi. Karena memang keanekaragaman hayati kita ini sedang di rintis, tapi oleh asing sedang di porak-porandakan.

Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Izin, Pimpinan.

Jadi, masalah peneliti asing itu saya minta sama Ibu Menteri. Jadi selama ini kan peneliti-peneliti asing itu masuk berdasarkan surat dari LIPI, masuk tanpa pendamping, tanpa apa, karena dianggapnya ada surat jalan dari LIPI. Akibatnya apa? Ya. banyak spesies kita yang cuma dimasukkan dalam ransel dibawa langsung keluar, dan ini menjadi konsen fraksi kami untuk hal tersebut. Jadi apabila mau masuk ya silakan urus izin sama LIPI, tetapi juga ada surat izin masuk dari LHK dan itu wajib pendampingan. Hanya apa yang diteliti? jangan bilang penelitian-penelitian, tapi ujung-ujungnya mencuri spesies yang mereka tidak miliki dan ada cuma di Indonesia.

Terima kasih Pimpinan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Baik.

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya pikir ini menjadi konsen yang luar biasa ya dari dan udah sangat lama, peneliti boleh, tetapi benar harus ada pendampingan yang kemudian kita *nggak* kecolongan. Kita seringkali kecolongan, sering banget kecolongan, apapun lah. Jadi, ini menjadi catatan yang yang tegas dari kita.

Bapak/ Ibu, semua sudah dijawab oleh Ibu Menteri. Kita akan masuk ke kesimpulan, tolong di. Baik. Bapak Ibu ini draf kesimpulan rapat kita kali ini akan saya bacakan.

1. Komisi IV DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam APBN Tahun Anggaran 2023 sesuai hasil pembahasan RUU APBN Tahun 2023 oleh Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp6.912.784.958.000,-, dengan komposisi Eselon I sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp453.076.374.000,-;
  - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp93.291.651.000,-;
  - c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebesar Rp257.816.947.000,-;
  - d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sebesar Rp1.361.950.098.000,-;
  - e. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp1.680.183.784.000,-;
  - f. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp643.629.568.000,-;
  - g. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp300.977.609.000,-;
  - h. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp340.236.792.000,-;
  - i. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp291.123.292.000,-;
  - j. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun sebesar Rp203.960.941.000,-;
  - k. Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebesar Rp380.804.524.000,-;
  - l. Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp227.062.921.000,-;
  - m. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp296.838.819.000,-; dan
  - n. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove sebesar Rp381.831.638.000,-.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menyampaikan hal pembahasan Anggaran Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.

Angkanya udah sesuai ya Pak Sekjen, semua. Para Anggota, Bu Menteri?

**(RAPAT:SETUJU)**

**MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):**

Setuju Pimpinan.

Terima kasih.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Jangan buru-buru Kang Dedy, Kang Dedy ini buru-buru ya.

2. Komisi IV DPR yang mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengawal penambahan alokasi, menu, dan lokasi, dan lokasi prioritas, dan, *dan-nya kok banyak*, serta mekanisme, *ayo diganti dan-nya*, serta mekanisme pengusulan Komisi IV DPR RI. Pengusulan apa? Program kali ya, pengusulan program.

Saya baca dulu deh.

2. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengawal penambahan alokasi, menu, dan lokasi prioritas serta mekanisme pengusulan program Komisi IV DPR RI dalam Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 dan 2024 sesuai surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.253/Menlhk/Setjen/Ren.0/9/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK.

Para Anggota? Ini maksudnya kan yang tadi kita bahas kan ya tanggal 13 September itu hasil rapat itu, itu 2023 juga? iya. Mekanisme aja deh, *nggak* usah pakai Komisi IV ya, serta mekanisme, nah oke. Oke. Iya tadi bolak-balik kalau pakai Komisi IV. Redaksinya jadi begitu, para Anggota mau dicermati, setuju? Bu Menteri?

**MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):**

Boleh di *adjust* sedikit *nggak*, Pimpinan?

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Silakan, Bu Menteri.

**MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):**

Komisi IV DPR RI mendorong KLHK untuk mengawal penambahan alokasi menu dan lokasi prioritas DAK Fisik Penugasan bidang Lingkungan Hidup tahun 2023 dan 2024, oke, sesuai Menteri ini. Tetapi diteruskan, kalimat dibawahnya diteruskan. Komisi IV mendukung untuk begitu untuk.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Komisi IV mendukung.

**MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):**

*Nggak*. Komisi IV mendukung KLHK, mendukung untuk pengembangan mekanisme DAK Fisik Penugasan bidang LHK dalam proses politik di legislatif maupun di eksekutif. Jadi yang yang KLHK kami bekerja bersama kementerian, tetapi yang legislatif-nya berarti Komisi IV dengan Badan Anggaran. Dan kalau boleh ditambahkan lagi, bahwa harapan dari yang terhormat Pak Ketua pada waktu yang lalu Anggota juga memberikan masukan kalau boleh jangan



Februari lagi Pak Ketua, kelihatannya terpaksa diambil di Desember atau Januari, karena Februari itu formulasinya udah mulai jadi. Terima kasih, Pimpinan.

Proses politik. Proses politik di dengan dengan dan dan meminta masukan dari Anggota Komisi IV DPR, Komisi IV, untuk usulan 2024 sampai dengan bulan Desember atau Januari, Pimpinan. Jadi kita memang akan *collect* datanya, bisa bisa dari orang menurut Anggota melalui Dapil kami juga mencoba juga *collect* dari kabupaten, nanti kita akan ada *meeting* khusus tentang ini antara KLHK dan Komisi IV.

Demikian Pimpinan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Rapat yang lalu kan *plotting*-nya Februari ya, ya Februari sudah telat ya.

**KETUA RAPAT:**

Izin, Pimpinan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Silakan.

**KETUA RAPAT:**

Saran saya kan kita nih ada reses nih Oktober, setelah reses Oktober nanti ada lagi Desember. Pada saat itulah kita pulang ke Dapil, kita *collect-collect* semua data, apa kebutuhan untuk mem-*backup* DAK kabupaten *Insyah Allah* pada waktu masuk Januari 2023 data sudah kita serahkan baik itu usulan kepada Banggar maupun kepada Kementerian LHK. Jadi tolong temen-temen Kapoksi ingatkan juga para Anggotanya.

Terima kasih, Pimpinan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Iya. Baik.

**MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):**

Izin, Bu Pimpinan.

Ini kayaknya belum pas deh. Yang kata serta mekanisme di atas dihapus, pengusulannya *nggak* apa-apa. Yang, *nggak*, hanya prioritas, pengusulan iya. Tetapi yang di mengembangkan ya mengembangkan, itu ditambah kata-kata mekanisme karena yang lalu seperti itu, Pimpinan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Ini Januari 2023 atau Desember 2022? Januari berarti ya, diganti Januari 2023.

Baik. Saya ulangi, saya baca.

2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengawal penambahan alokasi menu, dan lokasi prioritas pengusulan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 dan tahun 2024 sesuai surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.253/Menlhk/Setjen/Ren.0/9/2022 tanggal 19 September 2022 perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK. Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengembangkan mekanisme DAK Fisik Penugasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam proses politik di Eksekutif maupun Legislatif dan meminta masukan dari Anggota Komisi IV DPR RI untuk usulan tahun 2024 selambat-lambatnya bulan Januari tahun 2023.

Para Anggota? Bu Menteri?

**MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):**

Terima kasih Pimpinan.

Setuju.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Tolong tok-tok, ini tok-tok.

**(RAPAT:SETUJU)**

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):**

Tadi kecepatan, sekarang kelamaan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Ini gimana ini Kang Dedi ini, kadang kecepatan, kadang kelamaan.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Anggota Komisi IV DPR RI, agar pelaksanaan bimbingan teknis serta pelaksanaan program atau kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah pemilihan masing-masing Anggota Komisi IV DPR RI dapat tepat sasaran dan memiliki dampak jangka panjang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan

hutan, serta pelestarian hutan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Para Anggota? Bu Menteri?

**MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):**

Setuju.

Terima kasih, Pimpinan.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

**(RAPAT:SETUJU)**

Baik.

Bapak/Ibu, sekalian,

Itu kesimpulan rapat yang kita hasilkan pada Raker kali ini.

Terima kasih atas semua masukan dan semua dan masukan Bapak/Ibu sekalian untuk.

Sebelum menutup raper, rapat kita kali ini, raper jadinya karena memang udah laper ya, rapat kita kali ini, mohon Bu Menteri untuk memberikan kata-kata penutup.

Silakan Ibu Menteri.

**MENTERI LHK (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc):**

Terima kasih.

Pimpinan Komisi IV DPR RI yang kami hormati,  
Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Saya menyampaikan dengan tulus ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas arahan *correct* dan dukungan Komisi DPR RI untuk peningkatan kinerja Lingkungan dan Kehutanan.

Terima kasih. Kurang lebih, mohon maaf.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Terima kasih.

Oh iya, hasil Bamus saya umumkan ini Bapak/Ibu sekalian, hasil Bamus tadi dihadiri oleh Ketua dan Mas Ketua. Pak Kang Dedy tadi ikut ya? Dengan doa kita semua, dengan usaha, Bapanas masuk ke Komisi IV masuk jadi mitra Komisi IV. Badan Pangan Nasional.

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (H. DEDI MULYADI, S.H.):**

Hidup Sudin, S.E.!

**WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Terima kasih. Selamat sahabat-sahabat di Komisi IV. Ketua keren.

Baik.

Saya tutup.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq.  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.30 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

**Drs. ACHMAD AGUS THOMY**  
**NIP. 196508171988031002**